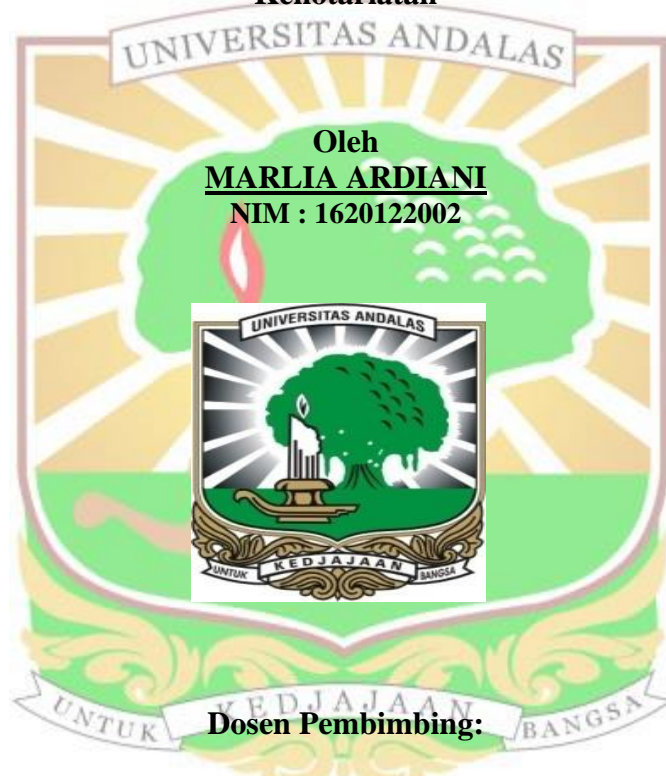


**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK
BERSERTIFIKAT GANDA OLEH KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(ATR/BPN) DI KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI
JAMBI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan**



Dr. Mardenis, S.H, M.Si

Dr. Azmi Fendri, S.H, M.Kn

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK BERSERTIPIKAT
GANDA OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) DI KABUPATEN BATANGHARI
PROVINSI JAMBI**

Marlia Ardiani. 1620122002. Program Magister Kenotarian Fakultas Hukum
Universitas Andalas. Halaman 92. Tahun 2019

ABSTRAK

Sertifikat merupakan tanda bukti hak dengan jelas telah nampak fungsinya yaitu sebagai “alat bukti” milik seseorang yang telah mengadministrasikan suatu bidang tanah, hanya saja dalam praktek penerbitan sertifikat masih dipertanyakan keefektifannya dalam memberikan kepastian hukum, karena tidak sedikit timbul permasalahan mengenai penerbitan sertifikat ini oleh BPN, salah satunya adalah tentang sertifikat ganda atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah tumpang tindih sertifikat. Apabila terbit dua sertifikat atau lebih atas satu bidang tanah sudah tentu akan menimbulkan sengketa antara kedua pemiliknya, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu 1) Bagaimana latar belakang terjadinya tanah hak milik bersertipikat ganda di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertipikat ganda oleh BPN Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Berdasarkan hasil penelitan akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa sertifikat ganda oleh BPN Kabupaten Batanghari, setelah melakukan penelitian penulis menemukan 1) Latar belakang dari terbitnya sertifikat ganda di Kabupaten Batanghari yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu dari BPN Kabupaten Batanghari kurang teliti dalam melaksanakan pengukuran luas tanah dan pemetaan, sedangkan faktor eksternal dari masyarakat dan juga kantor kelurahan tempat tanah tersebut berada. Adapun salah satu pemicu dari masyarakat yaitu tanah yang ditelantarkan selama berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakat sekitar menduga bahwa tanah tersebut tidak melekat hak di atasnya sehingga dalam pendaftaran digunakan alat bukti hak yang berbeda-beda atas tanah yang sama oleh 2 (dua) pemohon sertifikat. Sedangkan pemicu dari kantor kelurahan adalah tidak adanya tindakan administratif untuk mencatat dalam Buku Register Wajib Pajak Pemilikan Tanah tentang tanah-tanah yang sudah bersertifikat, sehingga kadang-kadang Kantor Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang kedua kalinya atas tanah yang sudah bersertifikat. 2) Sedangkan untuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda, BPN Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sudah melakukan tugasnya dengan baik di lihat dari perannya dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi penyelesaian sengketa sertifikat ganda yang di putus langsung dari BPN Kabupaten Batanghari belum efektif.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa tanah, Sertifikat hak milik ganda, ATR/BPN kabupaten Batanghari provinsi Jambi

**ADJUDICATION OF LAND DISPUTES DOUBLE OWNERSHIP
CERTIFICATE BY THE NATIONAL LAND AGENCY (BPN) IN
KABUPATEN BATANGHARI, JAMBI**

Marlia Ardiani. 1620122002. Magister Program of Notary, Faculty of Law
Andalas University. Page 92. 2019

ABSTRACT

A certificate is a proof of rights that is clearly intended as "evidence" of ownership for persons administering a plot of land. However, the effectiveness in providing legal certainty of these certificates is still questionable because of problems regarding the process of issuing them by the BPN. One problem is the issuing of more than one certificate which is popularly referred to as overlapping certificates. If two or more land certificates are issued for the same land, it will certainly cause a dispute between the two owners. In this research, the author formulated two research questions: 1) what is the background to the existence of double land certificates in Batanghari Jambi? 2) How are double land certificate disputes resolved by Batanghari Jambi BPN? The research method used was Empirical Juridical. After conducting research the author found 1) the background of the issuance of overlapping certificate in Batanghari Regency are internal factors and external factors, internal factors from Batanghari Jambi BPN were inaccurate in making measuring land area and mapping, while external factors from the community and the village office where the land is located. One of the triggers of the community is land abandoned for decades so that the surrounding community suspects that the land is not attached to the above rights so that in the registration evidence is used of different rights over the same land by 2 (two) applicants. While the trigger of the kelurahan office is the absence of administrative action to record in the Land Ownership Taxpayer Register Book about lands that have been certified, so that sometimes the Kelurahan Office issues a Land History Certificate the second time on land that has been certified. 2) As for Adjudication of double land certificates dispute, the Batanghari Jambi BPN has done its job well in view of its role in resolving disputes through the court. However, Adjudication of double land certificates dispute directly decided by Batanghari Jambi BPN has not been effective.

Keywords: Adjudication of land disputes, Double Ownership Certificate, ATR/BPN Kabupaten Batanghari- Jambi